

## TIM REFORMASI BIROKRASI

**2022**

KPT KPU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 05/HK.03.1/1812/4/2022, 11 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG  
PEMBENTUKAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

**ABSTRAK :**

- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Tulang Bawang Barat ini adalah: ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 26 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan KPU RI Nomor 612/ORT.05-Kpt/06/KPU/XII/2020.
- Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini berisi tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Januari 2022
- Lampiran 6 Halaman